



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Perangkat Daerah serta Unit Kerja Mandiri dibawahnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Kabupaten Asahan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6940);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Asahan (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 4);
 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Organisasi perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
6. Kinerja organisasi perangkat daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
7. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
8. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

BAB II

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan Tahun 2025 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Asahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan oleh organisasi perangkat daerah untuk :

- a. menyusun Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. menyusun Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah; dan
- c. menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten Asahan dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 22 April 2025

BUPATI ASAHAN,

t t d

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 22 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

t t d

ZAINAL ARIPIN SINAGA

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025 NOMOR 18

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 18 TAHUN 2025
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025**

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULA / RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN	SUMBER DATA
Misi 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Inovatif, Profesional, dan Akuntabel						
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi	1.Meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	1.Nilai LPPD	$\text{Nilai LPPD} = \sum \left(\frac{\text{IKK Realisasi}}{\text{IKK Target}} \times \text{Bobot IKK} \right)$	Di mana: 1. IKK Realisasi = Capaian kinerja yang dilaporkan oleh daerah 2. IKK Target = Target kinerja yang telah ditetapkan 3. Bobot IKK = Bobot yang diberikan pada masing-masing indikator berdasarkan tingkat kepentingannya Kemudian, setelah mendapatkan nilai akhir dari semua IKK, hasilnya dikonversikan ke dalam kategori predikat kinerja: Sangat Tinggi (≥90) Tinggi (70-89,99) Sedang (50-69,99) Rendah (<50)	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
			2. Nilai SAKIP			Nilai SAKIP=(Nilai Perencanaan×30%) + (Nilai Pengukuran×20%) + (Nilai Pelaporan×15%) + (Nilai Evaluasi×10%) + (Nilai Capaian Kinerja×25%)

			3. Level Maturitas SPIP	$\text{Persentase Maturitas SPIP} = \left(\frac{\sum \text{Nilai Subindeks}}{\sum \text{Bobot Maksimum}} \right) \times 100\%$	<p>Di mana:</p> <p>a. Nilai Subindeks = Skor yang diperoleh pada masing-masing elemen pengendalian.</p> <p>B. Bobot Maksimum = Total bobot yang mungkin dicapai.</p>	INSPEKTORAT DAERAH
			4. Indeks Profesionalitas ASN	$IPA = \frac{(\text{Skor Kualifikasi} + \text{Skor Kompetensi} + \text{Skor Kinerja} + \text{Skor Disiplin})}{4}$	<p>a. Skor Kualifikasi diukur dari jenjang pendidikan terakhir dan relevansi dengan jabatan.</p> <p>b. Skor Kompetensi dihitung berdasarkan sertifikasi, pelatihan, dan penguasaan bidang kerja.</p> <p>c. Skor Kinerja berdasarkan evaluasi capaian target kerja individu.</p> <p>d. Skor Disiplin dinilai dari kepatuhan terhadap aturan kerja dan kode etik ASN.</p>	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
		2. Meningkatkan pelayanan dan informasi publik berbasis IT	1. Cakupan pelayanan Smart City	<p>Cakupan Jaringan Internet(%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Area Terjangkau Internet}}{\text{Total Area Kota}} \right) \times 100\%$</p> <p>Cakupan Transportasi Publik Cerdas(%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Halte/Stasiun dengan Teknologi Cerdas}}{\text{Total Halte/Stasiun}} \right) \times 100\%$</p> <p>Cakupan Warga yang Menggunakan Layanan Digital(%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Warga yang Mengakses Layanan Digital}}{\text{Total Penduduk Kota}} \right)$</p> <p>Cakupan CCTV Kota(%) = $\left(\frac{\text{Jumlah CCTV yang Terhubung dengan Pusat Pemantauan}}{\text{Total CCTV di Kota}} \right) \times 100\%$</p> <p>Cakupan Sistem Keamanan Berbasis AI(%) = $\left(\frac{\text{Jumlah Wilayah dengan AI Security}}{\text{Total Wilayah Kota}} \right) \times 100\%$</p>	Setiap indikator ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kota dan skala implementasi Smart City. Jika kamu butuh perhitungan spesifik untuk kota tertentu	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			2. Indeks SPBE	$\text{Indeks SPBE} = \frac{\sum (\text{Skor Domain} \times \text{Bobot Domain})}{\sum \text{Bobot Domain}}$	<p>a. Skor Domain = Nilai dari masing-masing Domain berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>b. Bobot Domain = Bobot yang diberikan pada masing-masing Domain sesuai dengan tingkat kepentingannya.</p> <p>c. \sum Bobot Domain = Total Bobot dari semua domain.</p>	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Misi 2 : Meningkatkan Kerjasama antar Pelaku Usaha dan Pemanfaatan Potensi Unggulan Daerah dalam rangka mendorong perekonomian daerah.

Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah	Pertumbuhan Ekonomi sektor Primer	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Peningkatan Produktivitas potensi unggulan daerah sektor pertanian	<p>Produktivitas Pertanian Dasar</p> $P = \frac{Y}{A}$ $P = \frac{(L \times I \times T)}{A}$ <p>Produktivitas dengan Faktor Input</p>	Dengan menerapkan faktor-faktor seperti penggunaan benih unggul, irigasi yang efisien, pemanfaatan teknologi, dan manajemen pertanian yang baik, produktivitas sektor pertanian unggulan daerah dapat meningkat secara signifikan.	DINAS PERTANIAN
---	-----------------------------------	---	--	---	--	-----------------

	Pertumbuhan ekonomi Sektor Sekunder dan Tersier (Jasa, perdagangan, industri)	1. Meningkatkan daya dukung dan nilai tambah potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung potensi unggulan daerah	$PWB = (IM + SDM + TK + MK + IT) \times IS$	a. Faktor utama (IM, SDM, TK, MK, IT) merupakan elemen dasar dalam membangun wirausaha yang berkelanjutan. b. Iklim dan Stimulus (IS) menjadi faktor pengali yang mempercepat atau menghambat pertumbuhan, karena kebijakan yang tepat dapat mendorong lebih banyak wirausaha baru.	DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		2. Meningkatkan kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya Tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (kelompok sadar wisata) yang direalisasikan	$PDT = (A \times WA) + (B \times WB) + (C \times WC) + (D \times WD) + (E \times WE)$	a. PDT = Potensi Daya Tarik Pariwisata b. A = Keunikan dan keaslian budaya/kearifan lokal c. B Partisipasi dan peran aktif kelompok sadar wisata d. C = Infrastruktur dan aksesibilitas pendukung e. D = Promosi dan strategi pemasaran f. E = Keberlanjutan dan dampak lingkungan	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Misi 3 : Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam Membangun Kemandirian Ekonomi						
Meningkatnya peran masyarakat dalam pembangunan	Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	$\text{Persentase Desa Mandiri} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$ $\text{Persentase Desa Maju} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa Maju}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$ <p>Jika ingin menghitung persentase desa mandiri dan maju secara gabungan:</p> $\text{Persentase Desa Mandiri dan Maju} = \left(\frac{\text{Jumlah Desa Mandiri} + \text{Desa Maju}}{\text{Total Desa}} \right) \times 100\%$	a. Desa Mandiri: $IDM \geq 0,815$ b. Desa Maju: $0,707 \leq IDM < 0,815$ c. Desa Berkembang: $0,599 \leq IDM < 0,707$ d. Desa Tertinggal: $0,491 \leq IDM < 0,599$ e. Desa Sangat Tertinggal: $IDM < 0,491$	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
Misi 4 : Menciptakan Iklim yang Kondusif dan Kemudahan Investasi Bagi Pengembangan Usaha Dalam Menciptakan Lapangan Kerja						
Meningkatkan daya saing investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	Meningkatnya realisasi investasi daerah	1. Realisasi Investasi PMA (Juta US \$)	$\text{Realisasi Investasi PMA} = \frac{\text{Total Investasi dalam Rupiah}}{\text{Kurs Rupiah per USD}}$	a. Nilai Investasi Setiap Proyek: Total dana yang telah direalisasikan dalam proyek investasi asing. b. Total Investasi dalam Rupiah: Jumlah keseluruhan investasi yang telah direalisasikan dalam mata uang Rupiah. c. Kurs Rupiah ke USD: Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar yang berlaku pada saat perhitungan.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			2. Realisasi Investasi PMDN (Trilyun Rupiah)	$\text{Realisasi Investasi PMDN} = \sum (\text{Nilai Investasi PMDN per Proyek})$ <p>atau dalam bentuk lain</p> $\text{Realisasi Investasi PMDN} = \text{Total Nilai Investasi PMDN} \div 1.000$	Total Nilai Investasi PMDN = jumlah keseluruhan investasi dalam negeri dalam satuan miliar rupiah. Dibagi 1.000 untuk mengonversi dari miliar ke triliun rupiah.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Misi 5 : Meningkatkan akurasi proses perencanaan, penganggaran dan pengelolaan APBD yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat						
Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas proses analisis, penyusunan, dan pengelolaan APBD	Opini BPK	Rumus dalam Opini BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) sebenarnya bukan dalam bentuk formula matematis, tetapi lebih kepada kriteria dan standar yang digunakan dalam menilai kewajaran laporan keuangan suatu entitas pemerintah. Opini BPK = f (Kepatuhan, SPI, Kewajaran, Pengungkapan)	a. Jika semua kriteria terpenuhi → WTP b. Jika ada beberapa ketidaksesuaian yang tidak terlalu material → WDP c. Jika ada banyak kesalahan material → TW d. Jika data tidak bisa diaudit → TMP	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Misi 6 : Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Bermutu dan Menumbuhkan Partisipasi Masyarakat Dalam Memelihara Kesehatan						
Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat secara berkelanjutan	Indeks Kesehatan	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan masyarakat	1. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	$AKI = \left(\frac{\text{Jumlah kematian ibu}}{\text{Jumlah kelahiran hidup}} \right) \times 100.000$	a. Jumlah kematian ibu: Ibu yang meninggal selama kehamilan, persalinan, atau dalam 42 hari setelah melahirkan akibat penyebab yang terkait dengan kehamilan. b. Jumlah kelahiran hidup: Bayi yang lahir dengan tanda-tanda kehidupan. c. 100.000: Faktor skala untuk menyesuaikan angka agar bisa dibandingkan secara global.	DINAS KESEHATAN
Misi 7 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan daya dukung generasi muda yang melek teknologi dan budaya literasi tinggi						
Meningkatkan pendidikan yang unggul dan berkualitas serta peran generasi muda	Indeks Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi		Pendidikan Berkualitas = (Kurikulum Relevan + Guru Berkualitas + Fasilitas Memadai) × Inovasi Teknologi	a. Kurikulum Relevan b. Guru Berkualitas c. Fasilitas Memadai d. Inovasi Teknologi dalam Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN
Misi 8 : Mendorong Terciptanya Keamanan Dan Ketertiban Dalam Kehidupan Bermasyarakat						
Meningkatkan kondusivitas daerah	Angka kriminalitas	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum di masyarakat	Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum daerah	$CakupanPenyelesaian(\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Gangguan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Gangguan yang Dilaporkan}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah Gangguan yang Diselesaikan = jumlah kasus gangguan Trantibum yang telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai oleh pihak berwenang. b. Jumlah Total Gangguan yang Dilaporkan = jumlah semua laporan gangguan Trantibum yang diterima dalam periode tertentu.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Misi 9 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berorientasi mendukung Produktivitas dan Pengembangan Kawasan Strategis						
Menurunkan kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks infrastruktur wilayah	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	$PPJ = \left(\frac{L_{baik}}{L_{total}} \right) \times 100\%$	a. PPJ = Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%) b. Lbaik = Panjang jalan dalam kondisi baik (km) c. Ltotal = Total panjang jaringan jalan kabupaten (km)	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Misi 10 : Mewujudkan Lingkungan Hidup yang Berkualitas, Berkelanjutan dan Bernilai Ekonomis						
Meningkatkan kualitas dan kelestarian lingkungan hidup	Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	1. Indeks air	$n = \frac{c}{v}$	n = indeks bias medium (misalnya air) c = kecepatan cahaya di vakum (3×10 ⁸ ×10 ⁸ m/s) v = kecepatan cahaya dalam medium (misalnya air)	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			2. Indeks Udara	$IKU = \frac{(I_{high} - I_{low})}{(C_{high} - C_{low})} \times (C - C_{low}) + I_{low}$	C = Konsentrasi polutan yang diukur C _{low} = Batas bawah konsentrasi dalam rentang AQI C _{high} = Batas atas konsentrasi dalam rentang AQI I _{low} = Batas bawah indeks kualitas udara dalam rentang tertentu I _{high} = Batas atas indeks kualitas udara dalam rentang tertentu	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			3. Indeks Kualitas Lahan	$IKL = \frac{\sum(W_i \times S_i)}{\sum W_i}$	IKL = Indeks Kualitas Lahan W _i = Bobot dari setiap parameter kualitas lahan S _i = Skor dari setiap parameter kualitas lahan	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			4. Persentase RTH	$\text{Persentase RTH} = \left(\frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}} \right) \times 100\%$	a. Luas RTH = Luas total Ruang Terbuka Hijau dalam suatu wilayah (dalam satuan m ² , ha, atau km ²). b. Luas Wilayah = Luas total wilayah yang dihitung (dalam satuan yang sama dengan luas RTH). c. Persentase RTH = Hasil yang menunjukkan proporsi RTH terhadap total wilayah dalam bentuk persen (%).	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Misi 11 : Meningkatkan Pemahaman Dan Penerapan Nilai-nilai Keagamaan Dalam Segala Aspek Kehidupan Masyarakat yang Demokratis, Rukun, dan Gotong Royong.						
Meningkatkan kehidupan harmoni intern dan antar masyarakat dan umat beragama	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	Meningkatnya nilai kehidupan bermasyarakat dan wawasan kebangsaan	Cakupan ormas yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	$\text{Cakupan Pembinaan}(\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Ormas yang Dibina}}{\text{Total Ormas Terdaftar}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah Ormas yang Dibina = jumlah ormas yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan dalam periode tertentu. b. Total Ormas Terdaftar = jumlah keseluruhan ormas yang terdaftar dalam suatu wilayah atau sistem administrasi yang relevan.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Misi 12 : Meningkatkan perlindungan dan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan yang berbasis pada kompetensi sumber daya manusia.						
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	Persentase Keluarga Sejahtera	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Persentase PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya}}{\text{Total PMKS kategori miskin}} \right) \times 100\%$	a. Jumlah PMKS kategori miskin yang ditingkatkan kompetensinya → Jumlah individu dari kategori PMKS miskin yang telah menerima pelatihan, bimbingan, atau program peningkatan keterampilan. b. Total PMKS kategori miskin → Jumlah total individu dalam kategori PMKS miskin dalam suatu wilayah atau program tertentu.	DINAS SOSIAL

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ASAHAN**NOMOR 18 TAHUN 2025****TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025****INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2025****1. SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Amanah, Bersih dan Transparan	Nilai LPPD	Hasil penilaian Evaluasi Tim EKPPD	Bagian Tata Pemerintahan	Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, BPKP Provinsi Sumatera Utara dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
		Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi AKIP Kabupaten Asahan yang diberikan Menteri PAN dan RB pada tahun 2021	Bagian Organisasi	Keputusan Menteri Dalam Negeri

2. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan Anggota DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Reses x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang melaksanakan Kunjungan Kerja	Jumlah Anggota Dewan yang melaksanakan Kunker x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Ranperda yang disetujui DPRD bersama Bupati Asahan	Jumlah Ranperda yang disetujui x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Rancangan Peraturan DPRD yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan	Jumlah Rancangan Peraturan yang ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kab.Asahan x 80%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan
			Persentase Anggota DPRD Kabupaten Asahan yang mengikuti Pendalaman Tugas	Jumlah Anggota Dewan yang mengikuti Pendalaman Tugas x 100%	Sekretariat DPRD Kab.Asahan

3. INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengendalian interen secara terintegrasi	Pencapaian level sistem Pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Matulitas Penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisiensi, keandalan, pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan	Hasil penilaian dari BPKP	Irban IV	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Pencapaian level indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK)	Indeks efektivitas pengendalian korupsi yang selanjutnya disingkat IEPK adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi	Hasil penilaian dari BPKP	Irban V	Tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Pencapaian manajemen risiko indeks (MRI)	Manajemen Risiko indeks yang selanjutnya disingkat MRI adalah indeks yang menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko	Hasil penilaian dari BPKP	Irban I	tim Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi
		Persentasew pengaduan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti	Pengaduan masyarakat /APH adalah laporan dari masyarakat mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.	Jumlah laporan masyarakat/APH yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan masyarakat /APH yang diterima sesuai dengan ketentuan sikali 100%	Irban V	Sekretariat

	Pencapaian target Monitoring, Centre for Prevention (MCP)	MCP KPK merupakan program kolaborasi yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi upaya pencegahan korupsi agar tercipta tata kelola Pemerintah Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi	Hasil penilaian dari KPK	Irban III	Tim Monitoring Pencapaian MCP
	Pencapaian level Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Kapasitas APIP adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Ada 5 level Kapsitas APIP	Hasil penilaian dari BPKP	Irban III	Tim Penilaian Mandiri Kapasitas APIP
	Nilai Akuntabilitas Penyelenggaraan Kinerja Pemerintah pada Inspektorat	Evaluasi implementasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi kerja pemerintah	Hasil Evaluasi Internal dari Inspektorat	Sekretaris	Tim Evaluator SAKIP

4. DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas pendidikan dan peran generasi muda melek teknologi	Angka pendidikan dasar yang ditamatkan	Jumlah siswa jenjang tertinggi yang ditamatkan / jumlah penduduk usia sekolah x 100%	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
APK PAUD		Jumlah siswa jenjang PAUD formal berbagai usia / jumlah penduduk usia jenjang PAUD formal x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
APM SD		Jumlah siswa jenjang SD/MI/Paket A usia berbagai usia / jumlah penduduk usia 7-12 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
APM SMP		Jumlah siswa jenjang SMP /MTs/Paket B usia 13-15 tahun / jumlah penduduk usia 13-15 tahun x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	
Persentase SMP yang memiliki ruang baca digital		Jumlah SMP yang memiliki ruang baca digital atau lab komputer/ jumlah SMP se Kabupaten Asahan	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	

2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	jumlah event budaya yang dilaksanakan skala kabupaten / jumlah event budaya lokal daerah x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pendidikan	Temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan BPK/Inspektorat x 100 %	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Nilai Evaluasi AKIP	jumlah nilai evaluasi AKIP	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil survey kepada masyarakat	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
4	Retribusi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan	Meningkatnya Capaian Retribusi Daerah	Jumlah Target Capaian Retribusi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Laporan Hasil Evaluasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan

5. DINAS KESEHATAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULSI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan pemerataan dan kualitas layanan kesehatan masyarakat	Angka kematian Ibu	Jumlah kematian ibu dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 100.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka kematian Bayi	Jumlah kematian bayi dibagi jumlah kelahiran hidup dikali 1.000 kelahiran hidup	Dinas Kesehatan
		Angka Stunting	Jumlah anak balita sangat pendek dibagi jumlah anak balita yang diukur dikali 100 %	Dinas Kesehatan
		Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP	Dinas Kesehatan
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi paripurna	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang terakreditasi dibagi jumlah fasilitas pelayanan kesehatan dikali 100%	Dinas Kesehatan
2	Meningkatnya Target Retribusi Pengobatan Umum Umum Puskesmas	Jumlah Retribusi Pengobatan Umum Puskesmas	Pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di puskesmas, pukesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau Pemerintah Daerah	Dinas Kesehatan

6. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur yang baik	Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik dibagi jumlah panjang seluruh X100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi kabupaten dalam kondisi baik / Total panjang irigasi Kabupaten x 100 %	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	Jumlah Rekomendasi IKTR yang dikeluarkan dibagi jumlah rekomendasi ijin pembangunan yang diajukan dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		Persentase drainase kota dengan kondisi baik	jumlah panjang drainase kota dalam kondisi baik dibagi kota panjang drainase kota dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025
		persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	jumlah penduduk terlayani air minum (perpipaan) dibagi jumlah seluruh penduduk dikali 100%	Dokumen Renstra dan RPJMD 2021-2025

7. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penyelenggaran Penyelesaian Masalah Pertanahan	Persentase kasus pertanahan yang dimediasi	$\frac{\text{Jumlah kasus sengketa tanah yang dimediasi}}{\text{Jumlah kasus sengketa tanah yang terdaftar}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase penyelesaian ganti kerugian tanah	$\frac{\text{Jumlah ganti kerugian tanah yang diselesaikan}}{\text{Jumlah ganti kerugian tanah}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase luas lahan tanah asset Pemda yang bersertifikat	$\frac{\text{Luas lahan bersertifikat yang akan disertifikatkan}}{\text{Luas lahan keseluruhan yang akan disertifikatkan}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
2	Meningkatnya cakupan Rumah layak huni	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	$\frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
		Persentase PSU perumahan yang telah diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PSU perumahan yang diserahkan ke Pemda dalam kondisi baik}}{\text{Jumlah perumahan yang diserahkan ke Pemda}} \times 100\%$	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan

		Cakupan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) tertangani dikawasan kumuh	RTLH yang ditangani di kawasan kumuh tahun n X 100 % Jumlah total RTLH kawasan kumuh kabupaten	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan
3	Menurunnya luasan kawasan kumuh	Cakupan perbaikan RTLH diluar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Jumlah RTLH yang diperbaiki di luar kawasan kumuh dibawah 10 ha-----X 100% Jumlah RTLH di luar kawasan kumuh dibawah 10 Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Asahan

8. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/ PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan peran masyarakat dalam mejaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Meningkatnya Kondusivitas Daerah	1. Cakupan penyelesaian penanganan gangguan Trantibum Daerah	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban : Jumlah kasus yang di tangani x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			1.1 Persentase Gangguan Ketentraman, Ketertiban dan Kenyamanan yang ditangani	Jumlah kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dicegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan : Jumlah kasus yang di tangani x	Satuan Polisi Pamong Praja
			1.2 Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang tertangani	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan gubernur yang dapat ditangani sesuai SOP : jumlah laporan yang ada x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			2. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten	Satuan Polisi Pamong Praja
			2.1 Cakupan Pelayanan Pemadam Kebakaran	Jumlah Dokumen NSPM pencegahan penanggulangan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota setiap tahunnya : jumlah pencegahan/penanggulangan yang ditangani x 100 %	Satuan Polisi Pamong Praja
			2.2 Persentase Relawan Pemadam Kebakaran ditingkat Desa	Jumlah desa/kel yang terbentuk dan terbina relawan pemadam kebakaran setiap tahunnya : jumlah desa/kel 100%	Satuan Polisi Pamong Praja

9. DINAS SOSIAL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Keluarga Sejahtera PPKS	Persentase PPKS DI Luar panti yang memperoleh layanan sosial, memiliki keterampilan dan kemandirian	PPKS yang mendapatkan rehabilitasi / Jumlah PPKS yang ada x 100	Dinas Sosial
			Persenatse Tingkat Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah PPKS yang menerima bantuan sosial / jumlah PPKS X 100	Dinas Sosial

			Persentase PSKS perseorangan, kelembagaan dan sumber dana bantuan yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Jumlah PSKS yang terdata / jumlah seluruh penduduk Asahan x 100	Dinas Sosial
			persentase Korban Bencana alam dan bencana sosial kewenangan kabupaten yang mendapat pelayanan kebutuhan dasar.	Jumlah Penerima Bantuan / Jumlah Seluruh Korban Bencana x 100	Dinas Sosial
2	meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatkannya Kualitas Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil Evaluasi Impelementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

10. DINAS KETENAGAKERJAAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Peningkatan Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Pelayanan Pencari Kerja, Kesempatan Kerja an Perlindungan Tenaga Kerja	(jumlah tenaga kerja yang dilatih / Pendaftar Pelatihan berbasis kompetensi) X 100%	Dinas Ketenagakerjaan
		persentase layanan penempatan tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja lokal yang difasilitasi dan didampingi dalam pekerjaannya dibagi jumlah tenaga kerja terdaftar dikali 100%	
		persentase perusahaan yang mempunyai sarana hubungan insustrial	(jumlah perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial / jumlah Perusahaan) x 100%	

11. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan dunia usaha	persentase lembaga PHA pada lembaga pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha yang dibentuk	Jumlah Lembaga PHA pada lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha	jumlah lembaga PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah pada dunia usaha yang dibentuk dibagi jumlah seluruh lembaga	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	jumlah kegiatan peningkatan kualitas anak yang dibina		persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina	jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak yang dibina dibagi seluruh jumlah lembaga penyedia	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3	kasus kekerasan terhadap anak yang terselesaikan		terselesaikannya kasus perlindungan kekerasan terhadap anak yang ditangani	jumlah anak (penduduk kurang dari 18 Tahun) korban yang ditangani instansi dibagi jumlah anak yang menjadi korban melapor	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
---	--	--	--	---	---

12. DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI/PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya produktivitas, Ketahanan, dan peran ekonomi sektor Pertanian dalam arti luas	Ketersediaan Pangan Utama (Beras)	KGB X Produksi Padi (GKG)	KGB = nKonversi Gabah Ke Beras Sebesar 64,02% , PP = Produksi Padi setelah menjadi Gabah Kering Giling, Note : Nilai Konversi Gabah ke Beras Mengikuti Angka Konversi Nasional	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan

13. DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas air, udara, lahan dan pemanfaatan potensi ekonomis lingkungan hidup	Persentase Peningkatan kualitas kelestarian dan Lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)	Dinas Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Air (IKA)	Nilai relatif = C_i/L_{ij}	
			Rumus Metode IP	$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2 + (C_i/L_{ij})^2}{\frac{Rata-rata}{2} \cdot Maksimum}}$	
			$0 \leq P_{lj} \leq 1,0 \rightarrow$ ba		
			$1,0 \leq P_{lj} \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan		
			$5,0 \leq P_{lj} \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang		
			$P_{lj} \geq 10,0 \rightarrow$ cemar berat		
			Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKU = $100 - [50/0,9 \times (leu - 0,1)]$	
			Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKTL = $100 - \{(84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3\}$	
			Persentase RTH	Luas RTH dibagi Luas Kabupaten dikali 100%	
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah	Meningkatkan nilai SAKIP	Nlai SAKIP	Persentase Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	

3	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah	Meningkatnya capaian PAD	Restribusi Daerah	Realisasi PAD dibagi Target PAD dikali 100%	
---	-------------------------------------	--------------------------	-------------------	---	--

14. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi AKIP	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Tingkat tertib administrasi kependudukan	jumlah penduduk wajib Adminduk (KTP, KK, Akta Kelahiran<Akta Nikah) yang telah memiliki dokumen adminduk dibagi jumlah penduduk wajib adminduk dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase layanan pendaftaran penduduk	Jumlah E-KTP ber-NIK yang diterbitkan dibagi jumlah penduduk wajib E-KTP dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase layanan penerbitan pencatatan sipil	Jumlah layanan pencatatan sipil (kematian perkawinan perceraian dan catatan sipil lainnya) yang diterbitkan sesuai SOP dibagi jumlah layanan Pencatan Sipil (Kematian Perkawinan Perceraian dan catatan Sipil lainnya) yang dimohonkan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		cakupan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Tenaga Teknis Pengelolaan Data Kependudukan yang terampil dibagi jumlah Tenaga Teknis Pengelolah Data Kependudukan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		cakupan ketersediaan profil kependudukan tingkat kecamatan	Jumlah Data Profil kependudukan tingkat kecamatan dibagi jumlah kecamatan dikali 100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kemandirian masyarakat	Persentase desa mandiri dan maju didasarkan dari IDM	Jumlah desa kategori mandiri dan maju dasar dari IDM dibagi jumlah desa dikali 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Rata-rata Indeks Desa Membangun Tingkat Kabupaten	Jumlah Nilai Indeks Desa Membangun seluruh Desa dibagi Jumlah Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

16. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana prasarana angkutan umum	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	Panjang jalan kabupaten yang dilalui moda transportasi publik dibagi panjang jalan Kabupaten dikali 100%	Dinas Perhubungan

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya pelayanan dan informasi publik berbasis IT	Indeks Kategori PPID	Hasil penilaian PPID tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	(Jumlah Perangkat Daerah yang tersambung layanan Intra pemerintah daerah / jumlah perangkat daerah) x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Indeks SPBE	Hasil Penilaian dari Instansi terkait	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Tingkat Keamanan Informasi Persandian Daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah media informasi perangkat daerah yang telah dilakukan standarisasi keamanan sesuai BSSN bagi jumlah media informasi dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	Jumlah perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat Daerah / jumlah total perangkat daerah x 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
		cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan dibagi jumlah data statistik sektoral dikali 100%	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	Nilai SAKIP	Hasil Penilaian SAKIP tiap tahun	Dokumen renstra dan RPJMD 2021- 2026

18. DINAS KOPERASI, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkat dan berkembangnya Koperasi dan Usaha Mikro	Pertumbuhan Wirausaha Baru yang mendukung Potensi Unggulan Daerah	$\frac{\sum \text{Wirausaha baru tahun (n)} - \text{tahun ke (n-1)}}{100 \%}$ $\sum \text{Wirausaha baru tahun (n-1)}$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan bagi perekonomian	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB	$\frac{\text{Jumlah Wirausaha}}{\text{Jumlah Usaha Mikro}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian
3	Meningkatnya pertumbuhan industri berbasis komoditas unggulan daerah	Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB	$\frac{\text{Jumlah PDRB Perdagangan}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian	Jumlah target capaian retribusi	$\frac{\text{Jumlah PDRB Industri}}{\text{Jumlah total PDRB}} \times 100\%$	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian dan Badan Pusat Statistik
5	Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustri	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Nilai Hasil SAKIP	Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian

19. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	Realisasi Investasi PMA (Juta US\$)	Jumlah realisasi investasi PMA tahun 2025	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Renstra dan Laporan Monitoring Penanaman Modal
2	Meningkatnya kualitas layanan perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (Indeks)	Skala nilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan perizinan	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DPMPSTP	Nilai Evaluasi AKIP (skor)	Skala Nilai AKIP oleh Inspektorat	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Dokumen Nilai evaluasi AKIP oleh Inspektorat

20. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kreatifitas Pemuda dan Prestasi Olahraga	Persentase prestasi bidang kepemudaan dan olahraga yang dicapai	Persentase pemuda yang berprestasi	$\frac{\text{Jumlah Pemuda Berprestasi}}{\text{Jumlah Pemuda yang Mengikuti}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah Organisasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Organisasi pemuda yang ada}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Tingkat prestasi event olahraga	$\frac{\text{Jumlah Event Berprestasi}}{\text{Jumlah eVent yang di ikuti}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Kelompok Pramuka Aktif	$\frac{\text{Jumlah Gudep Aktif}}{\text{Jumlah Gudep Keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

2	Meningkatnya kelestarian potensi seni budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang sinergi dengan pengembangan wisata daerah	Potensi daya tarik pariwisata daerah berbasis kearifan lokal masyarakat (Kelompok Sadar Wisata yang direalisasikan)	Persentase daya Tarik Wisata yang ditetapkan	<u>Jumlah Daya Tarik Wisata yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati</u> Jumlah Daya tarik Wisata se-Kabupaten Asahan X 100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Lain/Pihak Ketiga	<u>Perjanjian kerjasama pariwisata antara pemuda dengan Pemda lain/Pihak ketiga</u> X 100% Kerjasama & Kemitraan Pariwisata yang direncanakan	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase pelaku ekraf yang aktif	<u>Produk/Karya Ekraf terdaftar HAKI</u> X 100 % <u>Produk/Karya Ekraf yang difasilitasi HAKI</u>	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
			Persentase SDM Pariwisata Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	<u>SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memiliki Sertifikat Tingkat Dasar</u> Jumlah SDN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibina pada Kompetensi Dasar X 100%	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
		Kontribusi PAD Pariwisata	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap Daerah	Sewa tempat, parkir dan sewa wahana wisata	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

21. DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan (termasuk online e-library) dibagi jumlah penduduk dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip
		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat		
2	Terwujudnya penyelamatan, pelestarian dan tertib arsip daerah	Indeks Hasil Pengawasan Kearsiapan	Jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan arsip secara baku dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Dinas Perpustakaan dan Arsip

22. DINAS PERIKANAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	DEFINISIS OPERASIONAL	FORMULASI/PERHITUNGAN	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan Sektor Perikanan dalam PDRB	Upaya untuk meningkatkan produksi perikanan	$\frac{\text{PDRBt} - \text{PDRBt-1}}{\text{PDRBt-1}} \times 100 \%$	Bidang Pengendalian Usaha perikanan Bidang Pengelolaan Pembudidayaan ikan	Badan Pusat Statistik dan Dinas Perikanan

2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Nilai SAKIP diperoleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat)	Jumlah Rata-Rata Nilai Per Aspek SAKIP	Sekretariat Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
---	--	---	--	--	-----------------------------	-----------------

23. DINAS PERTANIAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas Pertanian	pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman panga dan hortikultura	Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komoditi Strategis Tanaman Pangan dan Holtikultura	Dinas Pertanian
		Pertumbuhan produktivitas komoditi strategis tanaman perkebunan	Rata-rata Pertumbuhan Produktivitas komoditi Strategis Tanaman Perkebunan	Dinas Pertanian
2	meningkatnya nilai tambah produk pertanian	Pertumbuhan sektor pertanian dalam PDRB	$\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$	Dinas Pertanian

24. DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Produktivitas, ketahanan, dan peran Ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan sektor pertanian (Pertenakan) dalam PDRB	$\frac{PDRBt - PDRBt-1}{PDRBt-1} \times 100\%$	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase pertumbuhan produksi peternakan	Rata-rata pertumbuhan produksi peternakan	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
2	Meningkatnya kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Peningkatan kinerja pelayanan perangkat daerah, keuangan dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Evaluasi SAKIP	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

25. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas Akurasi Perencanaan dan Pengelolaan APBD	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		$\sum Dn = D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6$	Surat Keputusan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
				D1 = Dimensi Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	
				D2 = Dimensi Pengalokasian Anggaran Belanja dengan APBD	
				D3 = Dimensi Transparan Pengeluaran Anggaran	
				D4 = Dimensi Penyerapan Anggaran	

			D5 = Dimensi kondisi Keuangan Daerah D6 = Dimensi Opini Badan Pemeriksa Keuangan	
		Persentase Aspirasi Masyarakat melalui nusrenbang yang telah masuk dalam dokumen	$= \frac{\text{jumlah Aspirasi yang masuk ke dokumen perencanaan}}{\text{Jumlah Total Aspirasi yang di usulkan}} \times 100\%$	Laporan Hasil Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
		Indeks Inovasi Daerah	$= \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor total Maxsimum}} \times 100\%$	Badan Perencanaan Pembangunan Riset Dan Inovasi Daerah
		Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Bappeda Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	DEFINISI OPERASIONAL	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional dan Akuntabel	Persentase tercapainya Manajemen ASN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Indeks Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	Rumus Pengolahan hasil yang terdapat pada sistem Aplikasi Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Indeks Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) adalah pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa pelaksanaan suatu kebijakan, program, atau kegiatan sesuai dengan aturan, pedoman, dan ketentuan yang ditetapkan	Badan Kepegawaian Negara
			Indeks Profesionalitas ASN	Jumlah total hasil perkalian dan bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator	Indeks Profesional ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	Badan Kepegawaian Negara

			Indeks Sistem Merit	jumlah total dari aspek Implementasi Sistem Merit	Indeks sistem Merit adalah pengukuran tingkat penerapan prinsip sistem meri dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) oleh suatu instansi pemerintah. Sistem merit mengacu pada kebijakan dan praktik pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan bebas dari intervensi politik serta diskriminasi	Komisi Aparatur Sipil Negara
			Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Kepegawaian	Jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan kepegawaian dikalikan dengan penimbamh yang sama, yaitu 0,11 (untuk 9 unsur)	Indeks kepuasan masyarakat (IKN) atas layanan kepegawaian adalah pengukuran tingkat masyarakat yang menerima layanan kepegawaian dari sebuah instansi atau organisasi indikator ini digunakan untuk menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan masyarakat berdasarkan sejumlah dimensi layanan yang telah ditetapkan	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Nilai SAKIP	Jumlah rata-rata Nilai per Aspek Penilaian SAKIP	Nilai Evaluasi Kinerja instansi Pemerintah	Inspektorat Daerah

27. BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tingkat tertib Penyusunan Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Administrasi Barang Milik Daerah	Opini BPK	Hasil Opini BPK	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Total Indeks = D1 + D2 +D3 + D4 +D5 +D6 D1 = Dimensi 1, D2 = Dimensi 2, D3 = Dimensi 3, = D4 = Dimensi 4, D5 = Dimensi 5, D6 = Dimensi 6	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Tingkat Tertib Penyusunan Anggaran Daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Anggaran Daerah yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah Dokumen Anggaran Daerah}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Tingkat tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah	$\frac{\text{Jumlah Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			tingkat tertib administrasi barang milik daerah	$\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah dengan aset yang sudah sesuai dengan neraca dan tanpa catatan}}{\text{Jumlah Perangkat Daerah}} \times 100\%$	Badan Keuangan dan Aset Daerah
			Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja BKAD Kabupaten Asahan oleh Tim Evaluasi Sakip Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

28. BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Proses Analisis, Penyusunan dan Pengelolaan APBD	Opini BPK (Opini)	Pernyataan atau Pendapat Profesional BPK yang merupakan kesimpulan Pemeriksaan Mengenai Tingkat Kewajaran Informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan	$\frac{\text{Jumlah temuan BPK dan Inspektorat yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Temuan BPK dan Inspektorat}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

2	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Daerah	Pertumbuhan Pendapatan Daerah (persen)	Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n) dikurangi jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dibagi dengan jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1) dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n)} - \text{Jumlah Realisasi pendapatan Daerah Tahun (n-1)}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah Tahun (n-1)}} \times 100\%$	Bidang Perencanaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah; Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah; dan Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;	Badan Pendapan / Badan Keuangan Aset Daerah
3	Meningkatnya Koordinasi, Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah	Tingkat layanan pendukung urusan Pemerintahan (persen)	Jumlah Realisasi Serapan Anggaran dibagi dengan jumlah Pagu Anggaran dikali Seratus Persen	$\frac{\text{Jumlah realisasi pagu anggaran Total Pagu Anggaran}}{\text{Total Pagu Anggaran}} \times 100\%$	Bidang Sekretariat	Badan Pendapatan Daerah
		Nilai SAKIP (Poin)	Nilai SAKIP di peroleh dari hasil evaluasi Tim Penilai Internal (Auditor Inspektorat)	<i>Jumlah Rata-rata Nilai Per Aspek SAKIP</i>	Bidang Sekretariat	Inspektorat Daerah

29. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum	Persentase Peningkatan Kondustivitas Daerah	Tingkat Penanganan Penanggulangan Bencana	Jumlah penanganan penanggulangan bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kejadian bencana dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Persentase Desa Tangguh Bencana	Jumlah Desa tangguh bencana dibagi jumlah desa rawan bencana dikali 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiagaan
			Persentase layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jumlah kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yang dilaksanakan dibagi jumlah kasus evakuasi korban bencana yang terjadi dikali 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
			Tingkat keterpaduan sistem dasar penanggulangan bencana	Jumlah perangkat daerah yang telah terkoneksi dalam sistem manajemen bencana dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%	Bidang Rehabilitas dan Rekonstruksi
2	meningkatnya akuntabilitas, dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah	Persentase Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Nilai SAKIP	Nilai hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Asahan	Inspektorat Daerah

30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN ASAHAN

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI/PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Penerapan Nilai Agama Demokrasi dan Kegotong royongan di Masyarakat	Indeks Demokralisasi Indonesia (IDI) Kabupaten Asahan	Cakupan Kelompok yang dibina tentang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan kelompok yang dibina dibagi dengan jumlah kelompok yang menjadi sasaran x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Partai Politik yang difasilitasi	Jumlah partai politik yang Difasilitasi dibagi dengan jumlah partai politik yang terdaftar di Kab. Asahan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Pembinaan Ormas	Jumlah ormas yang mengikuti kegiatan pembinaan dibagi dengan jumlah Ormas yang terdaftar di Kab.Asahan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase Kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan baeragama dan kepercayaan	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina terkait Narkoba, kerukunan Beragama dan Kepercayaan dibagi dengan jumlah kelompok Sasaran masyarakat yang akan dibina terkait Narkoba, Kerukunan beragama dan kepercayaan x 100 %	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Konflik SARA	Persentase Konflik Sosial terselesaikan	Potensi konflik SARA dibagi dengan jumlah potensi konflik SARA yang tertangani x 100%	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

31. UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
I	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan RS	Akreditasi layanan Rumah Sakit	Nilai kelulusan Akreditasi rumah sakit	Nilai evaluasi tim akreditasi rumah sakit	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
1	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau	Cakupan layanan Rumah Sakit	1. Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Total dari nilai persepsi per unsur / total unsur yang terisi x nilai penimbang	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			2. tingkat pemakaian tempat tidur / bed occupancy rate (BOR)	(jumlah hari perawatan / (jumlah tempat tidur x jumlah hari dalam satu periode)) x 100 %	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			3. rata-rata lama pasien dirawat / average length of stay (AvLOS)	jumlah lama dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			4. Rata-rata lama tempat tidup tidal terpakai / turn of interval (TOI)	((jumlah tempat tidur x periode) - hari perawatan) / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
			5. frekuensi pemakaian tempat tidur / bed turn over (BTO)	jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) / jumlah tempat tidur	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

		6. angka kematian . 48 jam setelah dirawat / net death rate (NDR)	(jumlah pasien meninggal seluruhnya . 48 jam setelah dirawat / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal)) x 1000 permil	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
		7. angka kematian umum / gross death rate (GDR)	jumlah pasien meninggal seluruhnya / jumlah pasien keluar (hidup + meninggal) x 1000 permil	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
2	Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggara Pemerintah Daerah	Cost recovery rate (CRR)	realisasi pendapatan / realisasi belanja operasional	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG
		Sales Growth rate (SGR)	pendapatan tahun ini - pendapatan tahun sebelumnya) / pendapatan tahun sebelumnya	UPTD RSUD H. ABDUL MANAN SIMATUPANG

32. KECAMATAN (25 KECAMATAN)

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Akuntabilitas dan Profesionalitas Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Cakupan Penyelenggaraan urusan dan Pembinaan Kewilayahan yang di tangani	1. tingkat tertib administrasi layanan pemerintahan	Jumlah Administrasi Layanan Pemerintahan yang baik dibagi jumlah layanan pemerintahan dikali 100%	Sekretaris Kecamatan
			2. Cakupan kelompok masyarakat yang dibina dengan baik di tingkat kecamatan	Kelompok masyarakat yang dibina dibagi kelompok masyarakat yang ada dikali 100%	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan
			3. Persentase Penyelesaian Permasalahan bidang pemerintahan	permasalahan bidang pemerintahan yang diselesaikan dibagi permasalahan bidang pemerintahan yang ada di kali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum
			4. persentase peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan pangan	jumlah peningkatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional periode sebelumnya dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum
			5. cakupan administrasi pemerintahan desa	jumlah desa tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%	Kepala Seksi Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat
			6. Tingkat Penyelesaian Permasalahan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan	Jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban yang diselesaikan dibagi jumlah permasalahan ketentraman dan ketertiban dikali 100%	Kepala Seksi Pemerintahan dan dan ketentraman ketertiban Umum

BUPATI ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN